PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU

TAHUN 2024

Office
Jl. Andi Djemma No.1 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
Belopa-91994 Telp. 0471-3314003 Fax 04713314003
email. Blh_kabluwu@yahoo.co.id / blhluwu@gmail.com

DAFTAR ISI

Sampul Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dlh Kabupaten Luwu Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Dlh Kabupaten Luwu 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

2.4 Review Terhadap RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN 27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 29

3.3 Program dan Kegiatan 31

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 53
4.1 Sasaran dan Program Kegiatan 53
4.2 Indikator Sasaran Tahun 2024 53

BAB. V PENUTUP 63
5.1 Catatan Penting 64
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 64
5.3 Rencana Tindak Lanjut 64

KATA PENGANTAR

Renja Dinas ungkungan Hidup Kabupaten Luwu masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 .

Maksud dari penyusunan RENJA ini adalah sebagai bahan usulan kegiatan yang akan dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan musrembang Kabupaten Luwu Tahun 2023 ini mengakomodir pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Dewab (E-Pokir). Hasil dari Musrembang dan e-pokir dituangkan dalam Rencan Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2023. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Luwu Tahun 2020. Dengan adanya RENJA ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu agar lebih terarah,tepat sasaran dan tepat waktu.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa berkepentingan sangat kami harapkan.

Belopa Juli 2023
Kepala Dinas

Hj. ENRIKA, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19770919 200212 2 005

BAB . I

PENDAHULUAN

Alam dan ekosistem merupakan tempat hidup manusia yang perlu dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana tanpa mengganggu kelestariannya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan berbagai pihak, baik Perencana, Pengambil Keputusan, Penegak Hukum, dan Pejabat Pemerintah serta dunia usaha dan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sebagai lembaga institusi yang membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah dengan menetapkan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan dan tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Permendagri 86/2017). Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup melalui beberapa tahapan yaitu

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara konsisten sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan Undang- undang

Nomor 25 Tahun 2004. RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Luwu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah(PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja (Renja) PD.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan/isu pencemaran lingkungan, Kerusakan Lingkungan dan pengelolaan persampahan. Untuk mengatasi isu pencemaran lingkungan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu lebih memfokuskan untuk menurunkan beban pencemaran yang bersumber dari industri. Adapun untuk menangani isu kerusakan lingkungan lebih diarahkan untuk meningkatkan jumlah cadangan air yang dapat diresapkan untuk air bersih. Sedangkan dalam penanganan pengelolaan sampah ini lebih dioptimalkan untuk mencapai target Kabupaten Luwu bersih dari sampah tahun 2025.

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja PD dapat dilihat pada bagan alir tahapan penyusunan Renja PD Kabupaten sebagai berikut:

Gambar I-1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten

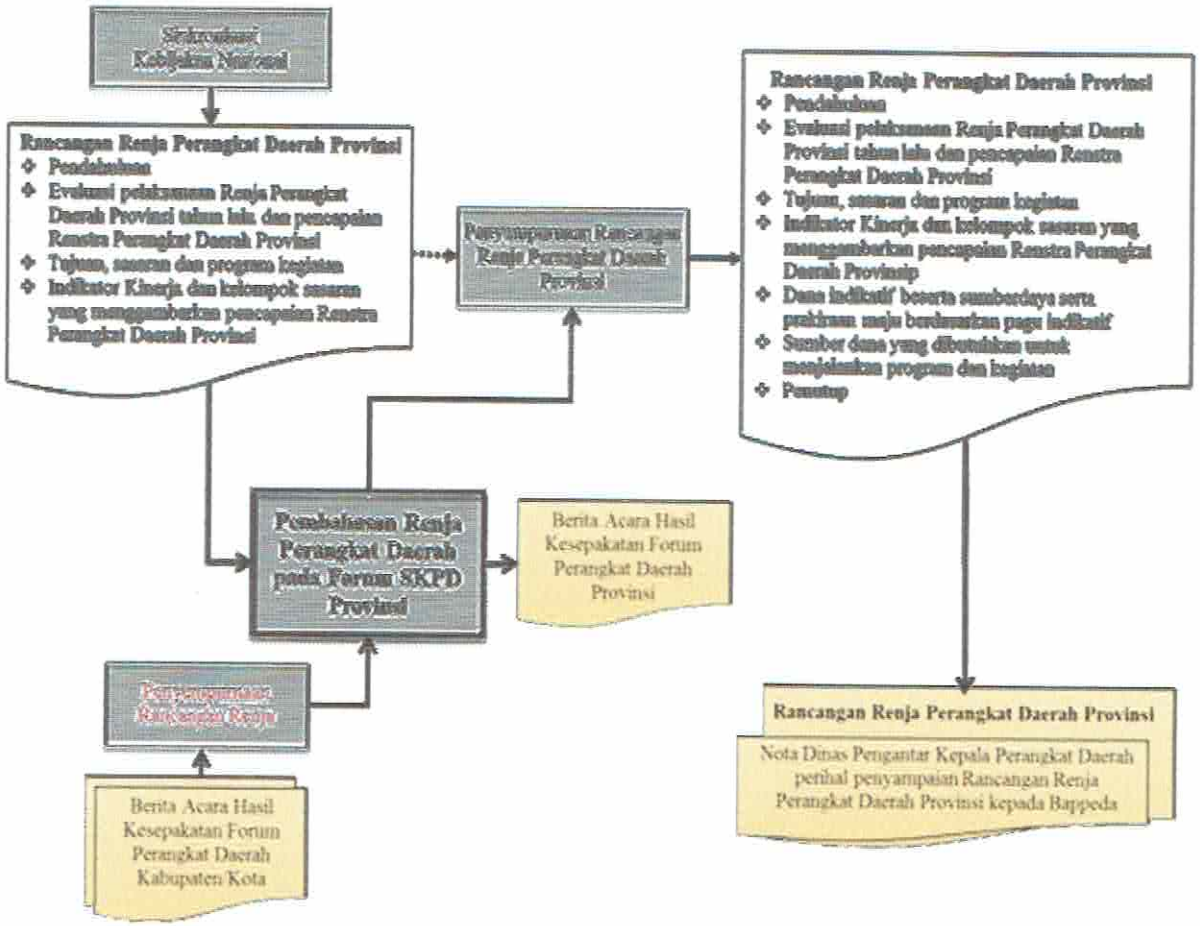

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2021 berlandaskan pada dasar hukum dan peraturan berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kajian Lingkungan Hidup strategis serta pelaksanaan program Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan LNRI Nomor 5059)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuji Indonesia Hijau.
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkunagn Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2023 ini disusun dengan maskud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

1) Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu ke dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2023.
2) Menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

1) Untuk mengarahkan seluruh kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu selama 1 (satu) tahun pada tahun 2023 sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra.
2) Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu selama 1 (satu) tahun pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, proses penyusunan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan'

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB . II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/ yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2022 didasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya yang melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;dan
3. Kebiajakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu

Evaluasi Renja tersebut untuk mengidenfikasikan realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan , serta mengidenfikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup melaksanan sebanyak 6 (Enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD sejumlah

Rp. 8.556.558.561,- (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran Rp. 8.371.976.304,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) atau sebesar 97,84%.

Berikut adalah penelaahan terhadap pencapaian program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022

Realisasi Kinerja Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022

No.	Program dan Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
Misi ke-01 Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel					
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik					
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**2.425.626.952**	**2.386.170.305**	**98.37**	**100.00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**20.658.100**	**19.648.100**	**95.11**	**100.00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.978.000	5.978.000	85.67	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.704.800	3.694.800	99.73	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.480.500	1.480.500	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.024.800	1.024.800	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.005.000	1.005.000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.468.600	4.468.600	100.00	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.996.400	2.996.400	100.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.944.688.562**	**1.917.930.629**	**98.62**	**100.00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.698.162	1.772.940.229	98.51	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.360.000	138.360.000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.935.200	3.935.200	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.695.200	2.695.200	100.00	100.00
	Administrasi Barang Milik Daerah	**9.000.000**	**9.000.000**	**100.00**	**100.000**

	Pada Perangkat Daerah				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	9.000.000	9.000.000	100.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**203.984.225**	**203.951.039**	**99.98**	**100.00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.127.000	3.126.000	99.95	100.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.280.000	2.274.000	99.74	100.00
	Penyediaan Bahan/Material	18.023.525	1.8.022.825	100.00	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.553.200	180.528.214	99.99	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**161.102.065**	**153.874.187**	**95.51**	**100.00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	57.902.065	51.724.187	89.33	100.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.800.000	6.750.000	86.54	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.400.00	83.400.00	100.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	**86.194.000**	**81.766.350**	**94.86**	**100.00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.194.000	81.766.350	94.86	100.00
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**150.000.000**	**136.454.600**	**90.97**	**100.00**
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	150.000.000	136.454.600	90.97	100.00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	150.000.000	136.454.600	90.97	100.00
Misi ke-10 **Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana**					
Sasaran : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan					
3	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**3.840.335.959**	**3.709.588.449**	**96.60**	**100.00**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**3.840.335.959**	**3.709.588.449**	**96.60**	**100.00**
	Koordisasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	1.312.750.000	1.222.517.040	93.13	100.00
	Koordisasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	24.325.000	24.313.400	98.38	100.00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.503.260.959	2.462.758.009	98.38	100.00
Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (LB3) dan timbulan sampah		***4.500.000***	***4.487.800***	***99,73***	***33,33***

4	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**9.514.700**	**8.932.300**	**93.88**	**100.00**
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**9.514.700**	**8.932.300**	**93.88**	**100.00**
	Koordisasi, Sinkronisasi, dan Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	9.514.700	8.932.300	93.88	100.00
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**16.637.500**	**16.606.700**	**99.81**	**100.00**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Lingkungan Hidup (PPLH)	**16.637.500**	**16.606.700**	**99.81**	**100.00**
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.637.500	16.606.700	99.81	100.00
6	**Program Pengelolaan Persampahan**	**2.114.443.450**	**2.114.223.950**	**99.99**	**100.00**
	Pengelolaan Sampah	**2.114.443.450**	**2.114.223.950**	**99.99**	**100.00**
	Penyusunan Kebijakan dan Srategi Dearah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	18.491.450	10.839.0550	99.45	100.00
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.095.952.000	2.095.833.400	99.99	100.00
TOTAL		**8.556.558.561**	**8.371.976.304**	**97.84**	**100.00**

Sumber : Data dioleh Dinas Lingkungan Hidup 2022

Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dan format sebagai berikut :

Tabel. 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU S/D TAHUN 2024

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tareget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = (6/7)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah														
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu														
2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra Renja yang disusun	2	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	100	2	Dok	6	Dok	300
2	11	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dok	3	Dok	300
2	11	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dok	3	Dok	300
2	11	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dok	3	Dok	300
2	11	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dok	3	Dok	300
2	11	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	100	1	Lap	3	Lap	300
2	11	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)/ Lkip	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dok	3	Dok	300

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tareget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = (6/7)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu														
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683	OB	2683	OB	2683	OB	2683	OB	100	2683	OB	8,049	OB	300
2	11	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	4	Dok	4	Dok	4	Dok	4	Dok	100	4	Dok	12	Dok	300
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	100	1	Lap	3	Lap	300
2	11	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	Lap	14	Lap	14	Lap	14	Lap	100	14	Lap	42	Lap	300
2	11	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD														
2	11	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3	Lap	3	Lap	3	Lap	3	Lap	100	3	Lap	3	Lap	100
2	11	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran														
2	11	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	100	3	Jenis	17	Jenis	243
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	100	15	Jenis	23	Jenis	575
2	11	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	25	Jenis	25	Jenis	25	Jenis	25	Jenis	100	25	Jenis	75	Kali	300
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan Dalam Daerah	50	OK	50	OK	50	OK	50	OK	100	50	OK	150	OK	300

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tareget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = (6/7)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa														
2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	200	Surat	200	Surat	200	Surat	200	Surat	100	200	Surat	600	Surat	300
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	300
2	11	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	OB	12	OB	12	OB	12	OB	100	12	OB	36	OB	300
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	19	OB	19	OB	19	OB	19	OB	100	19	OB	57	OB	300
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	40	Unit	40	Unit	40	Unit	40	Unit	100	40	Unit	120	KK	300
2	**11**	**02**				**PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup**														
2	11	02	2	02		Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten	Jumlah KLHS yang disusun														
2	11	02	2	02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	0	Dok	0	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dok	2	Dok	200

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tareget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = (6/7)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
2	11	03				**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**IKLH**														
2	11	03	2	01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten														
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	1	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	100	2	Lap	4	Lap	400
2	11	03	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	Lokus	1	Lokus	0	Lokus	0	Lokus	-	1	Lokus	2	Lokus	200
2	11	03	2	01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten	capaian data analisis	1	Dok	1	Dok	0	Dok	0	Dok	-	1	Dok	2	Lap	200
2	11	05				**PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase bahan berbahaya dan berasun (B3_ dan limbah B3 yang dapat dikendalikan**														
2	11	05	2	02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Volume limbah B3 yang dikumpulkan														
2	11	05	2	02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin Pengumpulan Limbah B3 yang difasilitasi	0	Ijin	0	Ijin	0	Ijin	0	Ijin	-	17	Ijin	17	Lokus	0

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tareget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = (6/7)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
2	11	06				**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan**														
2	11	06	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten														
2	11	06	2	01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Dokumen hasil Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dok	3	Dok	300
2	11	11				**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah perkotaan yang telah dilakukan pengelolaan**														
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan sampah														
2	11	11	2	01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang disusun	1	Dok	1	Dok	-	Dok	-	Dok	0	1	Dok	2	Dok	200
2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Jumlah kecamatan yang dilakukan penanganan sampah	2	Kec	2	Kec	2	Kec	2	kec	100	2	Kec	6	Kec	300

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada dasarnya efisiensi merupakan *perbandingan antara suatu hasil (output) dengan anggaran (input) yang dibutuhkan.* Dalam konteks tersebut ada beberapa prinsip yang harus diperhatian, antara lain efisiensi harus dapat diukur, efisiensi mengacu pada pertimbangan yang rasional, efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas(mutu), efisiensi merupakan teknis pelaksanaan, dan pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan. Dari definisi diatas dapat disajikan data capaian analisis efisiensi Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 atas capaian kinerja indikator (output) dibandingkan capaian realisasi anggaran (input) sebagai berikut

Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2023

No	Misi / Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Ket
Misi ke-01 **Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel**				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	**66,67**	**92,08**	
Misi ke-10 Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana				
	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	**100**	***97,66***	
	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	**69,70**	***99,73***	
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (LB3) dan timbulan sampah	**26,48**	***99,89***	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa atas dasar ***pencapaian kinerja*** (*output/outcome*) dibandingkan dengan pencapaian ***realisasi anggaran*** (*input*) dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2023 dalam pelaksanaan 2 misi dan 4 sasaran yang dijabarkan dalam 7 indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai upaya perwujudan dan pencapaian visi/misi yang ada, telah dilaksanakan dengan ***belum efisien.***

Tabel. 2-2
(Tabel T.C-30 Lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
1	Indeks Kualitas Air (IKA)			56,3	56,3	56,4	56,4	50	50	56,4	56,4	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)			86,3	86,5	86,5	86,6	90	90,12	90,25	90,25	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			56,7	56,8	56,8	56,95	74,18	74,18	74,23	74,23	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap Usaha yang Izin Lingkungan,Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota		√	16	18	19	20	-	-	-	-	
9	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	
10	Timbulan Sampah yang ditangani		√	85,01	85,75	86,35	86,90	23,08	30,61	60,15	60,15	
11	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		√	17,45	17,95	18,35	18,79	4,35	5,50	4,50	4,50	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu . Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Dinas menetapkan bahwa Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Sedangkan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu adalah:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Reviu RPJMD Tahun 2019-2024, isu strategis terkait lingkungan hidup yaitu Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau. Oleh karena itu Pengendalian pencemaran lingkungan menjadi salah satu prioritas pembangunan. Untuk mengetahui peningkatan kinerja peayanan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengendalian pencemaran lingkungan

maka dapat diketahui bahwa pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu terkait isu strategis terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Untuk pengendalian pencemaran air dari tahun 2022 ke tahun 2022 terjadi peningkatan 1,8%. Sedangkan untuk pengendalian pencemaran udara terjadi peningkatan kinerja sebesar 2,17% dan untuk limbah B3 sebesar 11,1%.

Sedangkan untuk Persentase volume sampah yang terkelola, untuk kinerja

Dinas Lingkungan Hidup belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun sebelumnya (2019) belum ada data pembanding dikareana tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menentukan presentase volume sampah

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dinas LIngkungan Hidup ditemukan beberapa permasalahan dan hambatan sebgai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menganalisa kualitas air dan udara sesuai parameter uji untuk perhitungan IKA dan IKU
2. Belum terbitnya revisi Pedoman penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang dapat menghitung nilai IKA yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan
3. Masih kurangnya kepedulian pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
4. Belum konsisten pelaku usaha/kegiatan dalam mengelola lingkungan
5. Belum optimalnya peran serta dan pemahaman masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Belum optimalnya jumlah personil dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penaatan hukum lingkungan

i. Belum adanya pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH) yang resmi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap izin lingkungan

7. Belum optimalnya penanganan pelaku usaha/ kegiatan yang tidak berizin dan menghasilkan limbah
8. Kurang tersedianya sarana prasarana untuk mobilisasi pengawasan dan sampling kualitas air/udara yang digunakan sebagai alat bukti
9. Masih belum memadainya Kapasitas SDM
10. Belum optimalnya koordinasi dan membangun jejaring kerja denganinstansi terkait Perencaanaan pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah belum optimal

11. Terbatasnya lahan yang memenuhi kritera teknis, administrasi dan sosial untuk kepentingan pengelolaan sampah
12. Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan sampah
13. Tingginya biaya operasional / pemeliharaan pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan sampah
14. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah
15. Kurang optimalnya ketersediaan dan jenis alat peraga sosialisasi
16. Belum optimalnya kapasitas SDM yang memahami teknologi pengelolaan sampah
17. Belum maksimal Partisipasi aktif peserta sosialisasi
18. Masih rendahnya peserta yang mengaplikasikan/menindaklanjuti hasil pembinaan pengelolaan sampah

Dari data permasalahan di atas, secara umum tidak berdampak langsung terhadap capaian visi dan misi Kabupaten Luwu. Namun disamping adanya permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan yaitu:

1. Melakukan penguatan masyarakat terkait pengendalian pencemaran lingkungan. Pengembangan sistem pada penanganan pengaduan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi dalam mendekteksi lebih awal terkait pencemaran lingkungan pada segmen (daerah/wilayah) yang terjadi pencemaran lingkungan
2. Melakukan pengembangan terkait pembangunan Pilot Project dengan melibatkan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait lingkungan.
3. Optimalisasi peran serta masyarakat terkalit pengelolaan sampah

2.4. Review Terhadap RKPD

Beberapa usulan yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2023.

Urusan lingkungan merupakan isu strategis global dan banyak menjadi pertimbangan dalam menilai kualitas kehidupan/produk di suatu wilayah.

Adapun tema pembangunan dalam RKPD tahun 2023 adalah penguatan Struktur Perekonomian Daerah Yang Unggul dan Berdaya Saing. Jika dihubungkan dengan lingkungan hidup maka prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah Peningkatan Kalitas Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Pemukiman. Adapun focus pembangunan salah satunya adalah pengelolaan sampah dengan 3R.

Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi dalam pencapaian pengelolaan sampah dengan pola 3R sebesar 0,5% setiap tahunnya, dan hal ini harus didukung oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan timbulan sampah akan terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan maka perlu dipikirkan untuk mengurangi sampah akhir.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota , provinsi

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),(2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi,(4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS),(5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV -High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional,(2) Nilai Ekspor HasilHutan, TSL dan 1Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutandengan Status Penetapan,(2) Luas Kawasan Hutanyang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan(3) Luas Kawasan Hutanyang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi,(6) OpiniWTP atas Laporan Keuangan KLHK,(7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian InternPemerintah) KLHK.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu merupakan pernyataan untuk mendukung tercapainya visi Bupati yaitu "LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI" pada misi ke-1 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel dan misi ke-10 yaitu Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu adalah :

a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif
b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Hidup

Berdasarkan tujuan di atas maka disusunlah sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu
Tahun 2019-2024

VISI : KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI			
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel			
Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Perangkat Daerah Serta Kolaborasi Antar Perangkat Daerah	Peningkatandan pengembangan kapasitas dankualitas SDM aparatur
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pendayagunaan Sumber Daya Alam Melalui Pengolahan yang bernilai tambah ekonomi dan mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan	Pemetaan potensi sumber daya alam yang memiliki nilai tambah ekonomi,disertai penyusunan kebijakan pedoman pemanfaatan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana yang menunjang peningkatan pemanfaatan sumber daya alam
			Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Bidang Pengawasan,Pengelolaan Sumber Daya Alam

	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Limbah Berbahaya dan beracun (LB3) dan Timbulan Sampah	Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota serta perusahaan dan Stakeholder terkait dan ketersediaan peningkatan sarana dan prasarana,mendorong keterlibatan masyarakat dan kab/kota dalam rangka mengefektifkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun timbulan sampah	Mendorong keterlibatan masyarakat dan kab/kota untuk menjaga kualitas lingkungan
			Peningkatan sarana dan prasarana LB3 dan pengelolaan persampahan
	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	Mendorong keterlibatan masyarakat ndan stakeholder terkait dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penerapan instrumen lingkungan	Penguatan dukungan kelembagaan dan tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan tahun 2024 merupakan bentuk Perwujudan dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

5 Pengolahan Data Retribusi Daerah

6 Penetapan Wajib Retribusi Daerah

7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

4 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

6 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas

7 Pemindahan Tugas ASN

8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

9 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

10 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

11 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7 Penyediaan Bahan/Material

8 Fasilitasi Kunjungan Tamu

9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3 Pengadaan Alat Besar

4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5 Pengadaan Mebel

6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

8 Pengadaan Aset Tak Berwujud

9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5 Pemeliharaan Mebel

6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten

1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten

2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten

2 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten

1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;

2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten

2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

2 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi

4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten

1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

3 Pengelolaan Kebun Raya

4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

6 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati

5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

1 Penyimpanan Sementara Limbah B3

1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten

1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

2 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

1 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten

1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

2 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten

1 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten

1 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten

1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

11 Program Pengelolaan Persampahan

1 Pengelolaan Sampah

1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten

2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

3 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten

4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

6 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten

2 Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta

1 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah

2 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

3 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

a. Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan meliputi:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab.Luwu mengacu peraturan Kementrian Dalam Negeri yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Adanya telaahan terhadap kebijakan nasional yang mengarahkan pada Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, Pengendalian Perubahan Iklim, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Dari beberapa proram tersebut, disesuaikan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup maka Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan menjadi program Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional.

- Untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kabupaten Luwu terkait lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Air dan Udara, Persentase sampah yang terkelola maka dirumuskan program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Adapaun rekapitulasi rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**4.772.140.974,00**							**2.503.802.399.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.772.140.974,00**							**2.503.802.399.200,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**4.772.140.974,00**							**2.503.802.399.200,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	-			**100 Persen**	**2.916.087.429,00**						-	**3.192.399.200,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu*	-			100 Persen	19.647.407,00			-	7. Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	-	-	21.899.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12.725.696,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	-		12.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.168.395,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	749.648,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.099.085,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		2.099.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	754.085,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.045.316,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.105.181,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu*	-			100 Persen	2.592.587.491,00			-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-	-	2.684.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.516.399.000,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		2.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	73.560.000,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.379.185,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.249.296,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan penyelanggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD*	-			100 Persen	8.724.477,00			-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-	-	9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	8.724.477,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi perkantoran*	-			100 Persen	81.625.484,00			-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-	-	224.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	715.250,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	977.250,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.970.000,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	11.912.134,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	66.250.850,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa*	-			100 Persen	155.988.230,00			-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-	-	188.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	62.758.230,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.030.000,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	79.200.000,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	57.314.350,00			-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-	-	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzioannya				15 Unit	57.314.350,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan	-		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup***	-			**100 Persen**	**34.435.770,00**						-	**350.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen RPPLH yang disusun dan dilakukan pengendalian pelaksanaannya*	-			1 Dokumen	9.474.000,00			-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokuman	9.474.000,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah KLHS yang disusun*	-			1 Dokumen	24.961.770,00			-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	12.308.000,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	12.653.770,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)***	-			**B (72,35)) Status**	**90.845.159,00**						-	**155.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan penyelenggaraan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten*	-			2 Persentase	90.845.159,00			-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-	-	155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	66.235.510,00	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	9.830.477,00	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	14.779.172,00	- Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kel/Desa - Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	-	-			-	**8.114.000,00**						-	**0,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	8.114.000,00			-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	8.114.000,00	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase bahan berbahaya dan beracun (B3_ dan limbah B3 yang dapat dikendalikan)***	-			**100 Persen**	**7.130.889,00**						-	**10.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Volume limbah B3 yang dikumpulkan*	-			11 m3	7.130.889,00			-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-	-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	7.130.889,00	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan***	-			**100 Persen**	**17.668.272,00**						-	**55.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten*	-			70 Persen	17.668.272,00			-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-	-	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	7.952.774,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	7. Pelestarian lingkungan hidup Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				12 Badan Usaha	9.715.498,00	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase pengaduan lingkungan hidup yang telah ditangani***	-			**100 Persen**	**7.902.598,00**						-	**25.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Cakupan penyelenggaraan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten*	-			100 Persen	7.902.598,00			-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-	-	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	7.902.598,00	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga***	-			**28 Persen 72 Persen**	**1.689.956.857,00**						-	**2.500.015.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Cakupan penyelenggaraan pengelolaan sampah*	-			1 Dokumen	1.689.956.857,00			-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-	-	2.500.015.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	11.487.307,00	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				6077,54 Ton	1.678.469.550,00	- Kab. Luwu, Suli, Suli - Kab. Luwu, Bajo, Bajo - Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa - Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana	-		2.500.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	JUMLAH							4.772.140.974,00							2.503.802.399.200,00	

c. **Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif,** Perubahan pagu pada rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal tersebut dikarenakan adanya porses *bottom up* (Musrenbang dan epokir). Untuk mengakomodir hal tersebut maka dilakukan perubahan terhadap rancangan awal RKKD

BAB . IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Luwu pada Tahun 2024. Target kinerja mempersentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dalam organisasi didalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

4.1. Sasaran Dan Program Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu maupun kegiatan- kegiatan spesifik Dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu kepada masyarakat.

Dalam Tahun Anggaran 2024 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis.

4.2. Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan koondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat,Pemerintah Daerah atau Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada masyarakat.

Ikhtisar Target Kinerja masing-masing sasaran strategis yang hendak

dicapai dalam Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

Indikator Kinerja Sasaran adalah merupakan target sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 yang disesuaikan dengan indikator / target kegiatannya, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target kegiatan dengan hal lain apabila kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

Berikut disajikan dalam lampiran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 di sajikan sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9
2 11	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**4.772.108.783**		**2.503.652.399.200**
2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**2.916.214.325**	**100**	**3.192.399.200**
2 11 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**19.648.400**	**100**	**21.899.200**
2 11 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	12.762.000	4	18.800.000
2 11 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.168.400	1	1.500.000
2 11 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	750.000	1	1.000.000
2 11 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.099.200	1	2.099.200
2 11 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	754.200	1	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9
2 11 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	1.045.400	2	5.781.800
2 11 01 2 01 06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1.105.200	5	2.000.000
2 11 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan**		**100**	**2.592.587.800**	**100**	**2.684.000.000**
2 11 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	23	2.516. 399.000	23	2.600.000.000
2 11 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	73.560.000	12	80.000.000
2 11 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1.379.200	1	2.000.000
2 11 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.249.600	4	2.000.000
2 11 01 2 03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**		**100**	**8.724.750**	**100**	**70.265.000**
2 11 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	8.724.750	3	9.000.000.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9
2 11 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum**		**100**	**81.841.190**	**100**	**224.500.000**
2 11 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	722.050	12	1.000.000
2 11 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	979.450	7	1.500.000
2 11 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1.970.000	12	2.000.000
2 11 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	25	11.912.490	12	20.000.000
2 11 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	66.256.200	50	200.000.000
2 11 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**156.084.685**	**100**	**188.000.000**
2 11 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	12.000.000	12	18.000.000
2 11 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	62.759.685	12	65.000.000
2 11 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	2.125.000	12	5.000.000
2 11 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	79.200.000	19	100.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
									2024		2025	
									Target	Rp.	Target	Rp.
1						2	3	4	6	7	8	9
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	**57.327.500**	**100**	**65.000.000**
2	11	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	57.327.500	15	65.000.000
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OB	12	**4.772.108.783**		**2.503.652.399.200**
2	11	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**2.916.214.325**	**100**	**3.192.399.200**
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	**19.648.400**	**100**	**21.899.200**
2	**11**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup**	**%**	**80**	**34.435.800**	**80**	**200.000.000**
2	**11**	**02**	**2**	**01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan**	**Dokumen**	**2**	**9.474.000**	**2**	**50.000.000**
2	11	02	2	01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	9.474.000	1	50.000.000
2	**11**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten**	**Jumlah KLHS yang disusun**	**Dokumen**	**1**	**- 24.961.800**	**1**	**150.000.000**
2	11	02	2	01	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	1	12.480.900	1	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9
2 11 02 2 01 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak /Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	Belopa	12.480.000	1	125.000.000
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air**		***B (72.36)***	**90.847.518**	***B (72.36)***	**155.000.000**
2 11 03 2 01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu yang di atasi**	**Pencegahan**	**2**	**90.847.518**	**2**	**155.000.000**
2 11 03 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Laporan	2	66.236.900	2	80.000.000
2 11 03 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	2	9.830.600	2	25.000.000
2 11 03 2 01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	capaian data analisis	Hasil Uji	2	14.780.018	2	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas area pengelolaan keragaman hayati kabupaten	Ha	25	8.114.000	1	
2 11 04 2 01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota/Kota	Lokasi	4	8.114.000	1	
2 11 04 2 01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	1	8.114.000	1	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase bahan berbahaya dan berasun (B3_ dan limbah B3 yang dapat dikendalikan	%	70	7.131.000	100	10.000.000
2 11 05 2 01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Laporan hasil verifikasi Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan	1	7.131.000	1	10.000.000
2 11 05 2 01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Laporan hasil verifikasi Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan	1	7.131.000	1	10.000.000
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	%	80	17.668.900	100	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*
2 11 06 2 01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/Atau Kegiatan Izin Lingkungan yang di Terbitkan Oleh Pemerintah**	**Ijin**	**137**	**17.668.900**	**100**	**55.000.000**
2 11 06 2 01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah izin yang difasilitasi	Dokumen	10	7.983.400	12	30.000.000
2 11 06 2 01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	15	15.943.400	2	
2 11 06 2 01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Dokumen	1	9.715.500	1	30.000.000
2 11 06 2 01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dokumen	1	**7.902.800**	***100***	**25.000.000**
2 11 010	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang telah ditangani**	**%**	***50***	**7.902.800**	**1**	**25.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9
2 11 010 2 01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten yang di selesaikan**	**Kasus**	**10**	7.902.800	1	25.000.000
2 11 010 2 01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Dokumen	1	**1.697.940.640**	**72**	**2.500.015.000.000**
2 11 010 2 01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	1	**1.679.940.640**	**1**	**2.500.015.000.000**
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah perkotaan yang telah dilakukan pengelolaan**	**%**	**72**	4.752.700	72	15.000.000
2 11 11 2 01	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah**	**Ton**	6077..54	1.693.187.940	6077..54	2.500.000.000.000
2 11 11 2 01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang disusun	Dokumen	1	**7.131.000**	***100***	**10.000.000**
2 11 11 2 01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	Jumlah kecamatan yang dilakukan penanganan sampah	Kecamatan	6	**7.131.000**	**1**	**10.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9
	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
2 11 11 2 01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah lokasi pengelolaan persampahan masyarakat yang disediakan	Lokasi	4	7.131.000	1	10.000.000

BAB . V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perancanaan penganggaran bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, baik melalui peran serta lingkungan hidup maupun masyarakat.

Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bidang Lingkungan Hidup perlu dipercepat untuk mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran, serta pengurangan dispenitas antar kawasan dan desa, serta adanya tuntutan masyarakat untuk peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas. Rencana Kerja ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu. Oleh sebab itu pelaksanaan RENJA membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini menjadi acuan kerjasama bagi unit-unit pelaksanaan di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu diharapkan unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target.

Melalui perencanaan sebagaimana dipaparkan dalam dokumen ini, diharapkan agar pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dapat lebih terarah, terpadu dan berbasis kinerja sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu dan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan Dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang memuat tentang program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Luwu. Penyusunan Renja dilakukan dengan pendekan partisipatif,*Top- down* dan *Bottom-Up*. Sehingga dilakukan penyesuaian antara tugas pokok dan fungsi DLH kab Luwu, partisipasi masyarakat (musrenbang) dan pokok-pokok pikiran Dewan (e-Pokir).

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pada tahun 2022, pelaksanaan kegiatan diutamakan dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Bupati yaitu Indek kualitas Air melalui pengendalian Penurunan Beban Pencemaran dari sumber Air limbah non domestik sumber institusi. Sedangkan untuk indikator kinerja Daerah yaitu indeks kualitas udara melalui Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi sumber tidak bergerak, dan Persentase volume sampah yang Terkelola.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja DLH ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Luwu sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran